

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan kesetaraan gender adalah merupakan masalah global yang dihadapi semua negara baik negara maju atau negara berkembang termasuk di Indonesia. Masih terdapat gap capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Padahal semestinya, mengacu pada aturan capaian Permendagri No. 15 Tahun 2008 mengenai pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki maupun perempuan agar mendapat kesempatan dan hak-haknya bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam kegiatan politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan sosial, ekonomi serta kesamaan hak dalam menikmati pembangunan (Harahap, 2014)

Mengacu pada studi Fauziyah & Whinarko (2022) laporan Indeks Ketimpangan Gender atau Gender Gap Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum pada tahun 2020 mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat 85 dunia dengan nilai sebesar 0.70. Nilai indeks ini merupakan nilai ketimpangan gender secara umum yang terdiri dari partisipasi dan kesempatan dalam ekonomi, pencapaian pendidikan, sub indeks kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan atau partisipasi politik. Bila dilihat dari sub-unit partisipasi dan peluang dalam ekonomi, Indonesia belum mencapai keseimbangan gender dengan nilai indeks sebesar 0.685. Angka ini menunjukkan bahwa sebesar 69 persen peluang perempuan berpartisipasi dalam perekonomian di Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, tujuannya tidak hanya berfokus pada capaian kesetaraan gender secara

nasional, tetapi juga pengurangan ketidakseimbangan kesetaraan gender secara signifikan antar wilayah (BPS, 2020).

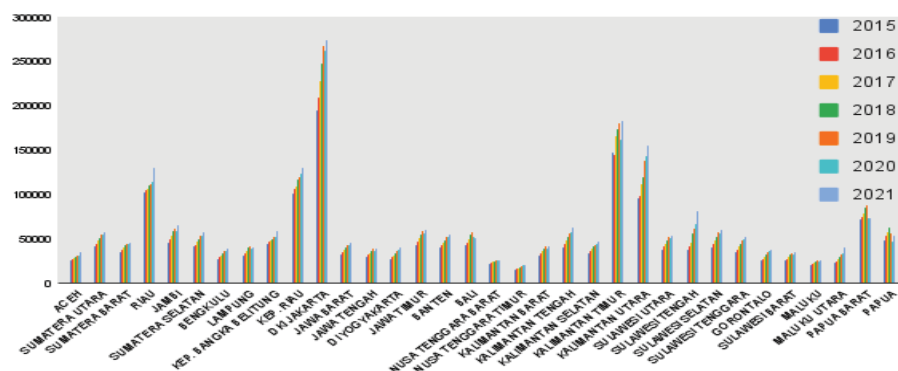
United Nation Development Programme (UNDP) menyatakan dalam Human Development Report (HDR) bahwa salah satu hal penting dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang merata antar generasi, antar etnis, antar jenis kelamin, maupun antar wilayah, dimana salah satu dimensi yang ditekankan oleh UNDP adalah kesetaraan gender (Widayanti & Mauretya, 2013). Tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta pencapaian kemakmuran bangsa dan daerah. Efektivitas pertumbuhan ekonomi akan lebih terjamin jika diikuti dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Mayoritas penduduk miskin di dunia adalah kaum perempuan (Todaro, 2004). Perekonomian semestinya tumbuh dan menyeluruh pada seluruh aspek masyarakat terlepas dari gender, termasuk masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga terhambat pada aspek tersebut. Akses kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, berbagai tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan pekerjaan yang dilancarkan oleh pemerintah sangat terbatas. Selain itu, masalah diferensiasi upah karena perbedaan gender dievaluasi sebagai salah satu yang paling penting dalam perekonomian negara dan kehidupan (Silingiene & Radvila, 2014).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia pun telah berkomitmen untuk pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Dalam hal ini telah disepakati sebelumnya dalam Millenium Development Goals (MDGs). Negara-negara di dunia yang tergabung dalam serikat Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan salah satu yang turut berkomitmen adalah Indonesia. Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan salah satu dari delapan tujuan MDGs tersebut yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Implementasi Millenium Development Goals (MDGs) menunjukkan dampaknya di seluruh negara, termasuk Indonesia. Laporan MDGs Indonesia tahun 2014 menunjukkan capaian di antaranya rasio penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari turun dari 20,60 persen pada tahun 1990 menjadi 5,90 persen pada tahun 2008 (Badan Pusat Statistik, 2015).

Penelitian McKinsey Global Institute (2012) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan kategori negara berkembang dengan pendapatan menengah beserta populasi penduduk yang sangat besar, dan dinyatakan pada peringkat ke-4 populasi tertinggi di dunia. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam G20, ukurannya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia masuk peringkat ke 16 PDB terbesar di dunia. Pada tahun 2012 PDB Indonesia sebesar 8 242 triliun rupiah dan PDB perkapita sebesar 33,34 juta per kapita (Sitorus, 2016). Tantangan utama dari pembangunan ekonomi adalah memperbaiki kualitas kehidupan sumber daya manusia (Todaro, 2004). Ia juga menambahkan bahwa kualitas hidup yang lebih baik adalah mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam artikelnya berjudul *Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha)*, salah satu indikator signifikan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode merupakan Produk Domestik Bruto.



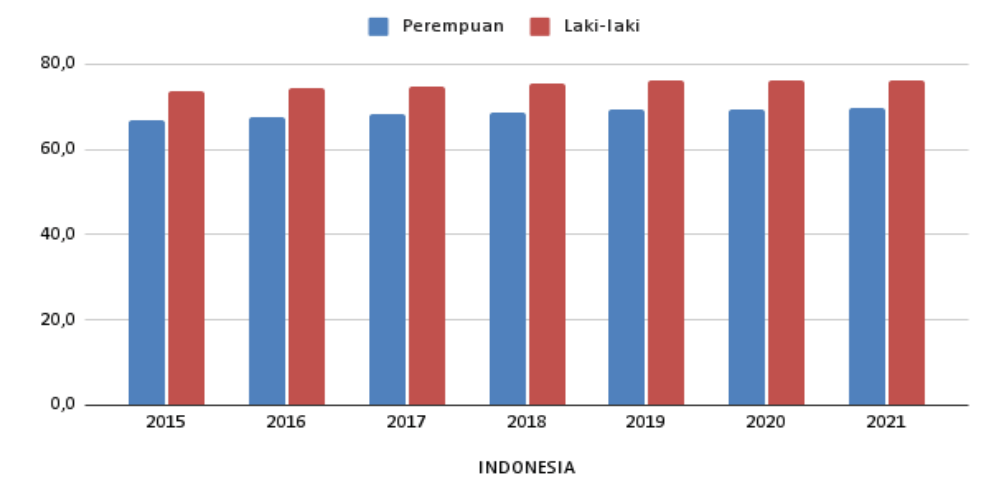
Gambar 1. 1 PDRB Per Provinsi Periode 2015-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama 7 tahun terakhir (2015-2021), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 34 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meski pada rata-rata peningkatan yang berbeda, tiap tahunnya provinsi-provinsi di Indonesia tumbuh secara perekonomian pada tingkat kesejahteraan penduduknya. Diantara 34 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta memiliki tingkat kesejahteraan penduduk tertinggi sepanjang 7 tahun (2015-2021). Provinsi DKI Jakarta juga terus mengalami tren meningkat dengan pendapatan rata-rata Rp.2.514.933,-. Menurut studi Putra (2016), laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Provinsi DKI Jakarta mempunyai PDRB tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa, dengan persentase 29,66% pada struktur ekonomi di bidang perdagangan. Kontribusi PDRB DKI Jakarta di Pulau Jawa sebesar 2.599,17 triliun rupiah, kontribusi ini tertinggi sepulau Jawa (Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, 2020). Struktur ekonomi di Jakarta didukung oleh sektor perdagangan, lima provinsi lainnya didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan.

Pembangunan sumberdaya manusia mempunyai arti peningkatan kemampuan dasar penduduk yang dibutuhkan guna memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu modal manusia disuatu negara, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP, 2016). IPM merupakan indeks untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan komponen dasar meliputi kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004). Dalam pembangunan manusia terdapat hubungan timbal balik

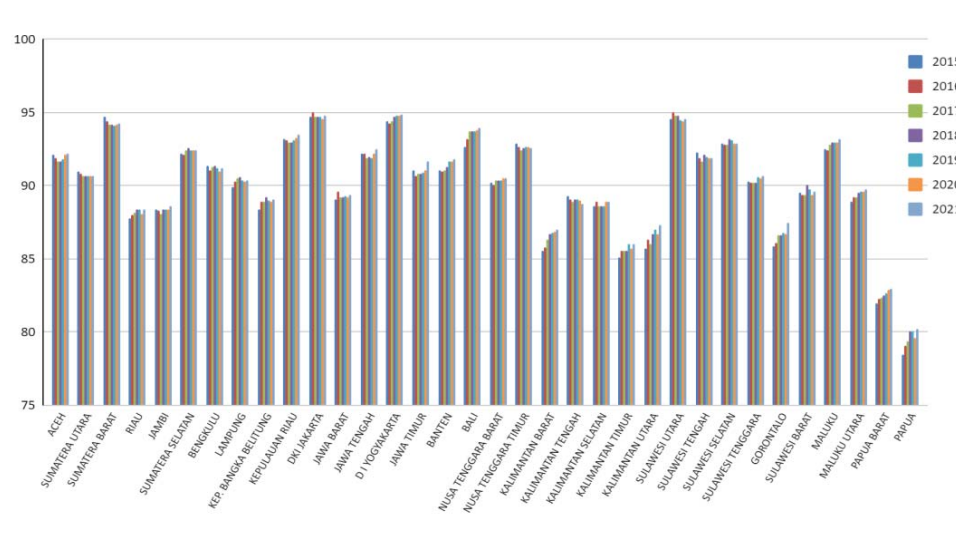
antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia, dalam hal ini adalah produktivitas dan pendapatan melalui terciptanya kesempatan kerja.



Gambar 1. 2 IPM di Indonesia periode 2015-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional Indonesia sepanjang 7 tahun terakhir (2015-2021) berfluktuasi setiap tahunnya baik untuk kategori laki laki maupun perempuan. Data tersebut juga menunjukkan, indeks pembangunan manusia laki-laki di Indonesia lebih tinggi daripada indeks pembangunan manusia perempuan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia laki - laki memiliki catatan angka tertingginya sebesar 76,3 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya indikator kesenjangan dalam pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun demikian, secara tren perkembangan pembangunan perempuan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Rata-rata pertumbuhan IPM laki-laki dalam kurung waktu 7 tahun terakhir (2015-2021) sebesar 75%, sedangkan rata-rata pertumbuhan IPM perempuan 68%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan IPM laki-laki dan perempuan tidak sama sebab berbagai faktor yang berpengaruh.



Gambar 1. 3 IPG Berdasarkan Provinsi periode 2015-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Tabel 1.3 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 34 provinsi di Indonesia selama 7 tahun terakhir (2015-2021) terjadi fluktuasi yang berbeda-beda pada tiap provinsi. Berdasarkan data perhitungan IPG dari Badan Pusat Statistik, Provinsi D.I. Yogyakarta menempati urutan tertinggi tiap tahunnya dengan rata – rata IPG 90,6 %. Meski bukan menjadi provinsi yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur (Aini, 2021), D.I Yogyakarta memiliki IPG yang lebih tinggi daripada kedua provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia sepanjang tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan gender masih terjadi antara berbagai wilayah di Indonesia. Mengacu pada UNDP (2016), komponen IPG adalah kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Harapan hidup mewakili kesehatan, tingkat melek huruf dan rata-rata waktu pendidikan mewakili pengetahuan, dan kontribusi pendapatan berdasarkan jenis kelamin mewakili ekonomi. IPG merupakan tolak ukur indeks perkembangan gender di suatu wilayah. Terkait dengan data tersebut, rasio IPG laki-laki terhadap perempuan sepanjang 7 tahun terakhir menunjukkan belum adanya pemerataan pembangunan manusia berbasis gender yang berlawanan dengan tujuan pembangunan di

Indonesia, yakni adanya pemerataan hasil pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh penduduk (Azuri, Zulhanif, & Pontoh, 2016).

Hasil dari angka keberhasilan indeks pembangunan berdampak manfaat pada masyarakat laki-laki dan juga perempuan. Namun, Hal ini tidak sepadan dengan realitas masyarakat bahwa perempuan masih berpartisipasi dari pembangunan. Realitas ini berkontradiksi dengan deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs) yang salah satu tujuannya mendukung tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak perempuan (Badan Pusat Statistik, 2015). Pada dasarnya, Keberhasilan angka pembangunan pun dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu kesehatan (*health*), pendidikan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard of living*) yang merupakan dimensi IPG, yaitu dari angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (MYS), serta pengeluaran per-kapita (BPS, 2019).

Ketimpangan gender menjadi alasan ada batasan bagi perempuan untuk menikmati hasil dan juga turut berpartisipasi dari pembangunan. Beban dalam pembangunan adalah pada kualitas kehidupan manusia, dikarenakan meningkatkan kualitas hidup manusia adalah tujuan pembangunan. Pada masalah ketimpangan gender, bahwasanya akan memberikan beban pada produktivitas, efisiensi, dan kemajuan ekonomi. Dengan menahan sumber daya manusia di rumah ataupun di pasar tenaga kerja, serta dengan sistematis adanya batasan bagi perempuan atau laki-laki terhadap akses ke sumber daya, jasa publik, atau aktivitas produktif, maka diskriminasi gender menambah beban suatu perekonomian untuk tumbuh serta mengurangi kapasitas untuk meningkatkan standar kehidupan. Sehingga kesetaraan gender merupakan isu dominan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terkait dengan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi pernah dilakukan oleh Adika dan Rahmawati (2021), ketimpangan gender diteliti pada indikator dan relevansi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif (IPEI) di

Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa indikator pada ketimpangan gender berpengaruh signifikan dan positif terhadap peningkatan IPEI dibandingkan peningkatan dari variabel laki-laki. Adapun penelitian yang menunjukkan hasil serupa terkait dengan ketimpangan gender, penelitian dilakukan oleh Idham Hariadinata (2019), menampakkan aspek ketimpangan gender berupa AHH, RLS, dan TPAK mempunyai rasio pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat pula hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Jacobus, Engka, dan Kawung (2022) bahwa ketidaksetaraan gender berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada variabel kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Seiring dengan penelitian tersebut, penelitian lain dikembangkan oleh Sari, Sarfiah, dan Indrawati (2019) penelitian tentang ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi secara spesifik terhadap produk domestik bruto (PDRB) dan dikerucutkan pada 7 periode, pada tahun 2011 hingga tahun 2017. Penelitian tersebut memaparkan hasil ketimpangan gender pada pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan secara simultan. Hasil penelitian tersebut didapatkan dengan menggunakan analisis data panel dan pendekatan *fixed effect model* (FEM).

Beberapa penelitian lain terkait dengan pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pernah dilakukan dalam lingkup daerah yakni beberapa diantaranya di Provinsi Jawa Timur (Elviani, 2022) dan Sulawesi Selatan (Irvan, Wahab, & Qarina, 2021). Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat hasil rasio variabel menunjukan hasil positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel yang dirasiokan yaitu angka harapan hidup laki laki pada perempuan, rata-rata lama sekolah laki laki pada perempuan menunjukkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki pada perempuan secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Penelitian ini mencoba membahas mengenai pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi dalam lingkup yang lebih luas yakni Indonesia dan rentang waktu yang lebih besar. Penelitian-penelitian yang telah

disebutkan sebagian besar menggunakan metode regresi data panel dan uji empiris.

Studi ketimpangan gender semestinya memiliki studi fenomena pembaruan yang mutakhir. Hal ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai fenomena yang butuh pembaharuan dari berbagai aspek variabel. Ketimpangan gender yang semestinya dapat dikaji dengan berbagai pendekatan dan metode penelitian, menjadi pertimbangan analitis dan teoritis yang dapat dikaji secara eksekutif. Oleh sebab itu, peneliti akan mengangkat judul yaitu **“Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 34 Provinsi di Indonesia pada periode 2015-2021.”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis pengaruh ketimpangan gender yang ada pada aspek variabel Indeks Pembangunan Gender, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Populasi, Pengeluaran Pendapatan Per Kapita, terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia pada periode 2015 - 2021.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data jenis sekunder. Data penelitian ini diperoleh dari lembaga resmi Badan Pusat Statistik dengan data panel berupa 34 provinsi di Indonesia dan data *time series* periode tahun 2015-2021. Untuk model penelitian ini, peneliti menggunakan software STATA 14. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model REM sebagai model pilihan utama. Analisis regresi data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu (Srihardianti, Mustafid, & Prahutama, 2016). Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis

pengaruh ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi untuk pada berbagai provinsi di Indonesia.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini akan mengetahui bagaimana pengaruh dari ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat melihat variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terkait dengan ketimpangan gender pada provinsi-provinsi di Indonesia.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang akan dijelaskan dan dibahas. Pada bagian setiap bab terdapat bahasan yang saling terkait antar bab. Penyusunan bab-bab tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi terkait masalah serta pembahasan skripsi sehingga dapat dimengerti dengan baik, oleh karena itu sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN
2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
3. BAB III: METODE PENELITIAN
4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN
6. DAFTAR PUSTAKA